

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola Pembangunan Nasional secara jelas terlihat bahwa Pembangunan Nasional Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja seperti ; pangan, sandang, perumahan, kesehatan, atau mengejar kepuasan batiniah seperti ; pendidikan, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan, dan lain sebagainya, melainkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan itu merata dirasakan di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan tertentu atau sebagian masyarakat saja, tetapi untuk seluruh Masyarakat Indonesia dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan antara lain tertuang dalam TAP-MPR RI 1993 :

"Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai"

Dalam mencapai tujuan tersebut, disusunlah Pola Pembangunan Nasional yang disebut Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, guna menyatukan langkah dalam pembinaan dan pembangunan bangsa. Sasaran utama jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan tidak semata-mata bersifat peningkatan di bidang ekonomi, akan tetapi juga bertujuan peningkatan di bidang sikap mental, perilaku dan pandangan-pandangan hidup statis tradisional kepada sikap mental logis dan dinamis serta kesediaan menerima prinsip-prinsip modernisasi.

Untuk mendukung program pembangunan desa, maka sangat diharapkan keikut-sertaan masyarakat desa untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga berhasil.

Komunikasi sebagai proses sosial dapat merubah sikap, pendapat dan perilaku masyarakat guna mendukung program pembangunan. Untuk itu sudah barang tentu dalam pelaksanaan program pembangunan diperlukan adanya sarana dan prasarana komunikasi sebagai usaha pengembangan arus informasi ke pedesaan.

Oleh karena kegiatan komunikasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan, maka penulis tertarik untuk meneliti langsung peranan komunikasi tatap muka terhadap pembangunan desa.